

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM TANGGAP DARURAT (*EMERGENCY RESPONSE PLAN*) BERDASARKAN NFPA 1600 TAHUN 2019 DI PTOG, JAWA BARAT TAHUN 2023

Bambang Sulisty^{1*}, Gama Widyaputra², Defi Arjuni³

^{1,2,3} Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi,
Universitas Binawan

Jl. Kalibata Raya - Dewi Sartika, No. 25-30; Jakarta Timur; DKI Jakarta 13630

*Penulis Korespondensi: Bambang Sulisty, Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Ilmu Kesehatan
dan Teknologi, Universitas Binawan

Email: bambang.sulisty@binawan.ac.id

ABSTRAK

Potensi terjadinya bencana non alam yang membahayakan terus semakin meningkat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sistem pencegahan dampak bencana non alam dalam lingkungan perusahaan yang tidak memadai. Sistem tanggap darurat yang memadai menjadi indikator preventif aspek kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerja sebuah perusahaan. Perusahaan PTOG Jawa Barat merupakan perusahaan yang bergerak dibidang minyak bumi dan gas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem tanggap darurat (*emergency response plan*) berdasarkan NFPA 1600 tahun 2019 di PTOG Jawa Barat tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian yang menganalisis evaluasi program, prosedur dan implementasi sistem tanggap darurat atau ERCM (*Emergency Response and Crisis Management*). Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan sumber data berupa data primer dokumen hasil wawancara serta data sekunder dokumen laporan, peraturan dokumen lainnya yang mendukung kajian penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program ERCM (*Emergency Response and Crisis Management*) di PTOG telah dilaksanakan dengan baik dan perlu untuk ditingkatkan. Penerapan NFPA 1600, tahun 2019 di PTOG, sudah sesuai dengan standard yang diacu dan sebagian besar sudah sesuai dengan regulasi, dan dari observasi lapangan terbukti dan data semua ada juga sudah terdokumentasi dengan baik. Pihak perusahaan yang bertanggung jawab atas kegiatan komunikasi dan koordinasi dengan pihak external, hal ini dilakukan oleh pekerja dari Area. Penelitian ini diharapkan untuk OG *Field* dapat mempertahankan dan meningkatkan prosedur yang sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Pedoman ERCM.

Kata Kunci: *Sistem Tanggap Darurat, NFPA 1600 Tahun 2019, Program ERCM*

PENDAHULUAN

Potensi terjadinya bencana non alam sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja sebuah organisasi termasuk perusahaan. PT OG merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di sektor di bidang minyak bumi dan gas. memiliki tingkat risiko tinggi terhadap pekerja di fasilitas tersebut. Ancaman terjadinya kebocoran gas dan minyak dapat memicu terjadinya keadaan berbahaya seperti kebakaran dan ledakan. ada pula bahaya yang di pengaruhi oleh alam yang dapat menyebabkan kekacauan serta kecelakaan

seperti angin puting beliung, gempa bumi, dan gelombang laut yang di pengaruhi oleh cuaca yang buruk seperti hujan yang disertai dengan sambaran petir. Untuk itu dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan harus memprioritaskan aspek kesehatan dan keselamatan pekerjanya *serta* Tanggap Darurat dan Kelangsungan Bisnis (*bussiness continuity*) harus berjalan seiring.

METODE PENELITIAN

Penelitian Analisis evaluasi program, prosedur dan implementasi tanggap darurat/ERCM (*Emergency Response and Crisis Management*) ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan

melakukan observasi, wawancara menggunakan lembar *checklist* (daftar pertanyaan) dan dokumentasi. Penelitian kualitatif ialah metode yang sering digunakan oleh sebagian orang untuk mengemukakan sebuah keadaan serta memahami fenomena mengenai apa yang diteliti, dari pendekatan tersebut didapat hasil berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diamati, dari pendekatan kualitatif ini dapat dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Sumber data penelitian: a). data primer: Sumber data diperoleh langsung di lapangan dalam melakukan observasi lapangan dan wawancara (Checklist) dengan menyiapkan sejumlah pertanyaan berhubungan dengan Tanggap Darurat

Emergency Response and Crisis Management (ERCM); b). Data Sekunder: yaitu mendukung data primer seperti dokumen-dokumen laporan kegiatan yang di lakukan seperti *Emergency Need Assessment (ENA)*, *Pre Insiden Planning (PIP)*, Rencana Penanggulangan tumpahan minyak Strategi, Tindakan dan Oprasi, *Emergency Response and Crisis Management (ERCM)* yang telah di lakukan, Pedoman Emergency Response and Crisis Management (ERCM); Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan dokumen lain berupa; jurnal dan penelian terdahulu terkait *Emergency Response and Crisis Management*.

HASIL PENELITIAN

Program ERCM (*Emergency Response and Crisis Management*) PTOG field

| No | Indikator PDCA ERCM (<i>Emergency Response and Crisis Management</i>) | Program ERCM OG field PT XYZ | Peraturan Kepala BNPB NO. 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana | PEDOMAN NFA 1600 Standard on Continuity Emergency 2019 edition | Kesesuaian |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | (Plan) Mengembangkan rencana Mengidentifikasi dan menilai potensi keadaan darurat, krisis, dan ancaman keberlanjutan bisnis | Melakukan ENA (<i>Emergency Need Assessment</i>) | Sebuah pendekatan sistematis yaitu mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko-risiko bencana | ENA (<i>Emergency Need Assessment</i>) identifikasi kejadian yang menimbulkan keadaan darurat serta <i>risk assessment</i> -nya yang akan disusun berdasarkan tingkat risiko yang kemudian di buatkan skenario keadaan darurat pada tiap tingkat risiko | Terdapat identifikasi keadaan darurat berupa ENA (<i>Emergency Need Assessment</i>) yang dilakukan sekali 1 tahun |
| 2. | (Plan) Mengembangkan | Melakukan PIP (<i>Pre</i> | Tahap Prabencana dilakukan | <i>Pre-Incident Planning</i> (PIP) | Terdapat prosedur |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | rencana Mengidentifikasi dan menilai potensi keadaan darurat, krisis, dan ancaman keberlanjutan bisnis | <i>Incident Planing)</i> | penyusunan Rencana Kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat didasarkan skenario menghadapi bencana dengan Rencana Kontinjensi (<i>Contingency Plan</i>) | prosedur berisi penanggulangan, pengendalian bahaya existing yang tersedia, dan sumber daya penanggulangan yang diperlukan. | penanggulangan bahaya berupa PIP (<i>Pre-Incident Planning</i>) yang di evaluasi sekali 1 tahun |
| 3. | <i>Do</i> (Melaksanakan rencana) Rencana yang telah disusun diimplementasikan secara bertahap | Pengendalian Akses Area Kerja | Peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana | Management sumber daya yang komprehensif | Terdapat Peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana dengan Management sumber daya yang komprehensif berupa pengendalian akses yang dilakukan setiap hari |
| 4. | <i>Do</i> (Melaksanakan rencana) Rencana yang telah disusun diimplementasikan secara bertahap | Terdapat Kegiatan Kesehatan | Mencegah terjadinya Epidemic dan Wabah Penyakit | Mencegah wabah (<i>outbreak</i>) atau kondisi darurat medis | Terdapat Kegiatan Kesehatan untuk mencegah wabah penyakit yang di lakukan secara rutin |
| 5. | <i>Do</i> (Melaksanakan rencana) Rencana yang telah disusun diimplementasikan secara bertahap | Terdapat Pelatihan dan <i>Training</i> | Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana | Setiap personil harus dilatih sesuai dengan kompetensi tugas dan tanggung jawab masing masing | Terdapat pendidikan dan pelatihan terkait dengan penanggulangan bencana yang dilakukan sekali 1 tahun |
| 6. | Check (Memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai | Terdapat Inspeksi Peralatan ERCM <i>Fire Protection Equipment and Oil Spill Equipment</i> | Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan serta penyediaan dan pemeriksaan, peralatan keadaan darurat. | Mengidentifikasi peralatan, fasilitas, dan yang dibutuhkan dalam merespon keadaan darurat, krisis, dan keadaan yang mengancam keberlanjutan bisnis | Terdapat pemeriksaan peralatan ERCM berupa <i>Fire Protection Equipment and Oil Spill Equipment</i> secara rutin dan dievaluasi setiap tahun |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>7. Action Evaluasi hasil tinjauan langsung terhadap semua personel yang terlibat dalam operasi tanggap darurat</p> | <p>Terdapat Simulasi keadaan darurat</p> | <p>Pelatihan siaga / simulasi (<i>Drill</i>) / gladi / teknis bagi setiap sektor Penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan <u>pekerjaan umum</u>).</p> | <p>Simulasi keadaan darurat dilakukan minimal setiap tahun</p> | <p>Terdapat simulasi keadaan darurat yang di lakukan setiap 1 tahun sekali</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Implementasi (Bab 6, NFPA 1600)

- a) Konfirmasikan bahwa rencana berfokus pada pencegahan dan pengendalian (mitigasi) bahaya, risiko, kerentanan, dan dampak yang telah teridentifikasi.
- b) Rencana harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan personel.
- c) Asumsi yang dibuat selama proses perencanaan.; Peran dan tanggung jawab fungsional internal dan eksternal lembaga, organisasi, departemen, dan posisi; Proses pendelegasian wewenang; Dukungan logistik dan kebutuhan sumber daya

Pencegahan

Harus mengembangkan strategi untuk mencegah insiden yang mengancam jiwa, harta benda, dan lingkungan; Strategi pencegahan harus didasarkan pada informasi diperoleh dan harus dijaga arusnya menggunakan teknik pengumpulan informasi dan intelijen; Konfirmasikan bahwa semua pekerja dilatih (mendapatkan pelatihan / training untuk mengetahui bagaimana menanggapi kemungkinan terjadi insiden (misalnya *Basic Safety Training* bagi pekerja dan khusus Tim OKD (Organisasi Keadaan Darurat).

Komunikasi (Bab 6 NFPA 1600)

Komunikasi antara perusahaan dengan stakeholder diawali dengan mengetahui identifikasi stakeholder tersebut, agar diketahui kualitasnya salah satunya sebagai pemasok, pelanggan,

media, investor,vendor. Prosedur dan standar berkomunikasi dengan stakeholder sudah tertuang dalam alur komunikasi yang wajib diketahui oleh semua penanggung jawab maupun pelaksana bila terjadi keadaan darurat atau bencana.

Komunikasi krisis dan informasi publik dikembangkan sesuai dengan rencana dan standar serta prosedur untuk menyebarkan informasi yang harus diterima oleh seluruh karyawan maupun masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak. Hal ini juga didukung oleh fasilitas yang memadai bagi perusahaan agar dapat terlaksana dengan maksimal. Informasi dan komunikasi dapat disampaikan antara lain berupa buletin, jurnal maupun majalah.

Pemberitahuan tentang kejadian kebakaran dan bencana berdasarkan standar dan prosedur beripal alur yang jelas, sehingga hal ini dapat diketahui dengan jelas dan detail oleh seluruh karyawan yang terdampak. Laporan dan kronologis kejadian tercatat dan didokumentasikan serta serta dilaporkan sesuai dengan standar alur pelaporan kejadian bencana.

Komunikasi Krisis dan Informasi Publik, harus mengembangkan rencana dan prosedur untuk menyebarkan informasi dan menanggapi permintaan untuk informasi dari audiens berikut sebelum, selama, dan setelah kejadian:

- a) Audiens internal, termasuk karyawan
- b) Audiens eksternal, termasuk media, kebutuhan fungsional penduduk,

dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya, harus membangun dan memelihara krisis komunikasi atau kemampuan informasi publik yang meliputi: pengikut:

1. Fasilitas kontak pusat atau hub komunikasi Pusat informasi fisik atau virtual, Sistem pengumpulan, pemantauan, dan sosialisasi informasi;
2. Tentukan cara memberi tahu audiens / stakeholder utama tentang keadaan darurat/bencana;
3. Rencanakan bagaimana informasi penting akan diberikan kepada seluruh pekerja serta audiens eksternal (stakeholder) utama dan cara berkoordinasi penyebaran informasi-informasi untuk memastikan konsistensi.

Kesinambungan / Kelangsungan dan Pemulihan Bisnis (Bab NFPA 16006)

Tentukan bagaimana memulihkan kondisi kritis atau sensitif waktu proses pemulihan secepat mungkin setelah bencana berakhir. Dalam regulasi terdapat pula ketentuan maupun peraturan tentang pemulihan kondisi kritis saat proses pemulihan setelah kejadian bencana. Regulasi juga diberikan dalam bentuk peraturan terkait penerapan tanggung jawab saat terjadi bencana jika manajer tidak berada di lokasi. Disamping peraturan tersebut juga terdapat peraturan terkait identifikasi pengembangan strategi untuk relokasi bagi masyarakat yang terdampak insiden.

Tindakan perbaikan proses tindakan korektif.

- a) harus mengambil tindakan korektif atas kekurangan diidentifikasi.

- b) Perbaikan Berkelanjutan. akan berlaku terus menerus perbaikan program melalui penggunaan program dan proses tindakan korektif;

Tinjau program dan pelatihan setidaknya setiap tahun untuk mengidentifikasi perbaikan selanjutnya.

PEMBAHASAN

Kebijakan Manejemen

Manajemen tanggap darurat harus menjadi kebutuhan dan dituangkan dalam kebijakan manajemen. Tanpa dukungan komitmen dan keinginan dari manajemen dalam bentuk nyata serta dibuktikan dengan tindakan, maka program pengelolaan tanggap darurat tidak akan berhasil. Untuk tingkat nasional, kebijakan tentunya ditetapkan oleh Presiden dan untuk daerah adalah Kepala Daerah setempat. Untuk tingkat perusahaan kebijakan keadaan darurat harus ditetapkan oleh pimpinan setempat. Kebijakan ini menjadi landasan penerapan manajemen bencana di masing-masing daerah atau perusahaan/ organisasi. dan dapat dikembangkan dari ditetapkan strategi pengendalian bencana, penyediaan sumber daya yang diperlukan serta organisasi pelaksanaannya. Kebijakan ini juga sangat penting karena sekaligus menjadi bukti komitmen pimpinan setempat terhadap penerapan manajemen bencana di lingkungannya masing-masing. Dengan demikian, semua pihak terkait, bawahan dan anggota tim pengendalian bencana akan memperoleh dukungan nyata dari pimpinan setempat.

Identifikasi dan Penilaian Risiko Bencana (Disaster Risk Assessment)

Unsur berikutnya dalam sistem manajemen bencana adalah identifikasi dan penilaian risiko bencana. Identifikasi bencana mutlak diperlukan sebelum mengembangkan sistem manajemen

bencana. Tanpa mengetahui apa jenis dan skala bencana yang akan dihadapi, maka upaya penanggulangan bencana akan sulit dilakukan dengan baik dan efektif dan perlu dilakukan Evaluasi Risiko, hasil penilaian risiko tersebut, selanjutnya ditentukan peringkat risiko yang mungkin timbul dengan mempertimbangkan kerentanan dan kemampuan.

SDM (Sumber Daya Manusia)

Penanganan bencana memerlukan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensi dan kemampuannya. Banyak permasalahan timbul ketika bencana terjadi karena sumber daya yang terlibat dalam penanggulangan kurang memadai atau tidak tahu tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, sebelum menyusun sistem manajemen bencana yang baik, terlebih dahulu harus diidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan misalnya untuk tim penanggulangan, tim medis, tim logistik, tim teknis dan lainnya.

Bencana tidak dapat ditanggulangi dengan efektif dan cepat tanpa didukung oleh prasarana dan logistik yang memadai. Identifikasi kekuatan yang berhubungan dengan ketersediaan dan kehandalan peralatan juga perlu dilakukan penilaian dan perhitungan agar kita mengetahui kesiapan menghadapi kondisi darurat.

Prasarana dan material merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan penanggulangan bencana. Banyak kejadian, dimana korban tidak berhasil ditolong karena tidak tersedianya prasarana atau peralatan yang memadai sehingga jumlah korban meningkat

Beberapa sarana yang diperlukan dalam penanganan bencana antara lain:

- 1) Alat pemadam kebakaran (Fire monitor, fire extinguisher, fire hydrant).

- 2) Peralatan penanggulangan bahan kimia berbahaya dan beracun
- 3) Peralatan keselamatan untuk menanggulangi kejadian seperti helm/ topi masker, sepatu, sarung tangan.
- 4) Peralatan Komunikasi (Telpon satelit, immarsat, radio VHF).
- 5) Peralataan medis (Stretcher, responder bag, AED)
- 6) Peralatan transportasi (mobil pemadam, vacuum truck, mobil ambulance).

Peran Instansi Pemerintah terkait dan Fungsi

Dalam melaksanakan penanggulangan bencana di daerah akan memerlukan koordinasi dengan sektor. Tugas dan tanggung jawab dan wewenang anggota tim manajemen krisis melakukan koordinasi dengan instansi pusat terkait (KLHK, ESDM, BNPB, BASARNAS, PUSKODALNAS, HUBLA, TNI/POLRI, Sektor Sosial, Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sektor Kesehatan, Rumah Sakit, Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sektor Lingkungan Hidup, dan instansi terkait lainnya. bersifat preventif, advokasi, dan deteksi dini dalam pencegahan bencana.

Siklus PDCA pada ERCM (Emergency Response and Crisis Management)

Kecepatan dan keberhasilan pemulihan dapat sangat ditingkatkan dengan pembentukan proses dan protokol sebelum bencana untuk perencanaan pemulihan pasca bencana yang terkoordinasi dan implementasi.

1. Mengembangkan rencana (Plan)

Perencanaan awal berupa skenario yang didalamnya memuat sumber daya yang diperlukan, strategi pengendalian, organisasi, sistem komunikasi serta dampak ke lingkungan.

2. Melaksanakan rencana (Do)

Pre-Incident Planning (PIP) berisi prosedur penanggulangan, pengendalian bahaya existing yang tersedia, dan sumber daya penanggulangan yang diperlukan; Training dan Kompetensi SDM; Simulasi Tanggap Darurat; Memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai.

3. Check

a) Pengujian (Drills and Exercise) Pengujian dilakukan secara berkala, minimal 1 kali dalam 1 tahun dengan tujuan menilai keefektifan rencana manajemen krisis, dan pengelolaan keberlanjutan bisnis. Pengalaman dan pelajaran berharga dari pelaksanaan pengujian sangat.

b) Evaluasi (Evaluations) Sesi evaluasi dilakukan dengan singkat setelah latihan pengujian untuk memastikan bahwa setiap perbaikan terkait peraturan keadaan darurat diidentifikasi, dicatat, dan dilaksanakan. Bentuk dari evaluasi ini dapat berupa tinjauan tahunan yang dilakukan untuk mengevaluasi tanggap darurat, manajemen krisis (ERCM) dan pengelolaan keberlangsungan bisnis di masing masing unit area sebagai bagian dari umpan balik setiap kali terjadi perubahan yang melibatkan organisasi, teknik, personil, dan administrasi pihak eksternal, tanggap darurat, atau belajar dari kejadian.

4. Melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan (Action)

a) Terminasi & Pemulihan. Terminasi adalah akhir dari kegiatan respon

tanggap darurat termasuk penentuan oleh pemimpin tertinggi dari struktur tanggap darurat, kapan saat yang tepat untuk menghentikan kegiatan tersebut dan memulai upaya pemulihan. Sedangkan proses pemulihan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Asset/ Eksplorasi/ Project untuk mengembalikan situasi pada kondisi semula untuk dapat beroperasi secara normal.

b) Penilaian (Assessment) dan tindak lanjut (rekomendasi). Penilaian tahunan dilakukan menggunakan alat (tool) (yaitu penilaian terhadap orang, tempat, proses, dan kinerja).

5. Perencanaan Program terdiri dari : rencana, pelaksanaan program, penentuan visi, misi dan tujuan program. Penilaian risiko terhadap kemungkinan kerugian akibat kecelakaan, kebakaran dan bencana. disusun dengan metode HIRARC (Hazard Identification Risk Assessment Risk Control, JSA (Job Safety Analysis, HAZOPS (Hazard Operability Study, FTA (Fault Tree Analysis) Penilaian terhadap sumber daya untuk mempersiapkan keadaan darurat antara lain respon, komunikasi, koordinasi dan rencana pemulihan.. Perencanaan manajemen krisis harus menangani isu-isu yang mengancam elemen strategis, reputasi.

Penilaian risiko untuk mengembangkan strategi dan rencana terdiri dari: mengidentifikasi dan memantau bahaya. Evaluasi terhadap kejadian bencana antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung berapi, tanah longsor, ambles, banjir, banjir bandang, gelombang pasang, struktur/bendungan/tanggul air, kekeringan, badai angin, siklon tropis,

badai, tornado, air cerat, badai debu/pasir, temperatur ekstrim (panas, dingin), kebakaran hutan belantara, sambaran petir.

Program penatalaksanaan keadaan darurat dilakukan sesuai dengan perencanaan dan telah terdokumentasikan dengan baik. Perencanaan Program tersebut sudah dilengkapi dengan perencanaan program disertai dengan penerapan visi, misi dan tujuan.. Pelaksanana penilaian terhadap risiko jika terjadi kejadian yang tidak diharapkan, kecelakaan, kebakaran dan bencana. Disamping itu penilaian terhadap sumber daya dalam pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat dan bencana diantaranya respon, komunikasi, koordinasi dan rencana pemulihan.

Perencanaan program harus menangani serta menanggulangi isu-isu yang mengganggu kegiatan keberlangsungan produksi; 2. Penilaian risiko dilakukan dengan melakukan identifikasi serta melakukan pemantauan terhadap bahaya yang mungkin dapat terjadi. Evaluasi yang dilakukan terhadap kejadian bencana.; 3. Melakukan peninjauan dan mendokumentasikan prosedur pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat; 4 Melakukan analisis terhadap dampak bahaya peledakan, kebakaran atau akibat bencana alam, sehingga memungkinkan melakukan tindak lanjut untuk menghadapi kemungkinan terjadinya dampak yang mungkin timbul sebagai akibat bencana terhadap masyarakat yang tinggal di area perusahaan maupun para pekerja. Didokumentasikan dan dilaporkan ke koordinator.

Inspeksi internal dilakukan setiap 3 bulan, kendala atau temuan yang ditemukan dalam inspeksi internal tersebut, harus segera dilaporkan untuk tindakan perbaikan. Bahaya dalam bentuk temuan harus tercatat dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini segera diselesaikan dengan baik dan maksimal.

Selalu melakukan identifikasi terhadap semua kegiatan baik berupa softfile dalam bentuk dokumen maupun dalam bentuk serta perangkat keras serta melakukan analisis terhadap kemungkinan terjadinya dampak yang mungkin dapat muncul. Dalam hal ini terkait erat dengan penyelamatan alat maupun dokumen.

Tersedianya catatan untuk mendata dan dapat mengidentifikasi jumlah data dan lokasi, sehingga catatan dapat diinventaris jika terjadi kejadian yang tidak diharapkan. Catatan berupa inventaris tersebut dapat dikonfirmasi yang menjelaskan bahwa informasi tersebut sudah disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pekerja meliputi: dampak bisnis sudah terdokumentasi, back up data; data lain seperti rekam medis, daftar peralatan, gambar dan spesifikasi terdokumen tasi dengan baik dan di back up dengan soft copy.

Pelaksanaan informasi komunikasi yang dilaksanakan pihak pemadam kebakaran setempat sudah terjalin dengan baik. Dalam hal ini sudah ada hubungan Kerjasama dengan pihak pemadam kebakaran setempat. Salah satunya melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar terkait bahaya atau dampak yang mungkin dapat muncul akibat bencana maupun peledakan atau kebakaran yang terjadi di area produksi.

Pelaksanaan program keselamatan kebakaran bukan hanya diberikan kepada masyarakat pekerja saja, namun termasuk masyarakat yang tinggal disekitar area. Begitu juga dengan pengawasan serta pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya bahay kebakaran dan bencana.

Sebagai antisipasi dari kejadian yang tidak terduga tersebut, antisipasi berupa cakupan asuransi yang memadai sebagai biaya tambahan. Termasuk juga jika terjadi bencana yang menyebabkan kerugian bagi

masyarakat yang tinggal disekitar area, pemberian makan dan perawatan mereka yang terlantar karena suatu insiden dan juga perhatian terhadap kesehatan mental serta kesejahteraan fisik individu yang terkena dampak. Disamping itu meningkatkan sosialisasi pendidikan kesiapsiagaan keluarga dan pelatihan bagi karyawan dengan kurikulum berdasarkan pada program kerjasama dengan pemadam kebakaran setempat. Evaluasi rencana program, prosedur Pendidikan & pelatihan dan dilakukan secara terus menerus.

- a) Pertemuan dengan Damkar membahas bahaya lokasi dan perencanaan pra-insiden sudah dilakukan
- b) Identifikasi program pelatihan / training yang diperlukan untuk mempersiapkan suatu insiden, dilakukan untuk seluruh fungsi dan TKJP yang sesuai, sudah dilakukan: Training Fireman; Pengawas K3; Operator K3 ke Pusdiklat BNSP dan Aka Migas, First Aider ke RS Cirebon.

Perencanaan ditujukan untuk pencegahan dan pengendalian bahaya maupun, risiko, kerentanan, dan dampak yang telah teridentifikasi. Perencanaan program ditujukan juga pada kesehatan dan keselamatan personel. Sebelum perencanaan tersebut diprogramkan terlebih dahulu harus diidentifikasi, dianalisa, dievaluasi dan didokumentasikan. Tugas pokok dan fungsi masing-masing personil tetap diterapkan sesuai dengan jabatan dan struktur organisasi yang telah ditetapkan.

Tindakan pencegahan sudah harus tertuang saat pembuatan perencanaan program dan program pengembangan strategi untuk mencegah insiden yang mengancam jiwa, harta benda, dan lingkungan khususnya di area produksi maupun masyarakat sekitar yang terdampak. Program pencegahan dilaksanakan berdasarkan pada informasi

diperoleh dari informan maupun intelijen yang memiliki tugas pokok dan fungsi tersebut. Selain itu pelaksanaan program pelatihan bagi pekerja dan khusus Tim OKD (Organisasi Keadaan Darurat) yang bekerjasama dengan pemadam kebakaran setempat dan juga bekerja sama dengan Pemerintah Daerah terkait lainnya; Data intelijen didapatkan dari Mapping dan Polsek; Pelatihan bagi pekerja dan khusus Tim OKD, rutin dilakukan (setiapa tahun) record tahun 2023 dan 2023 dibulan juni.

KESIMPULAN

OG field telah memiliki Prosedur ERCM (Emergency Response and Crisis Management) yang mengacu kepada Pedoman ERCM (Emergency Response Crisis management). Menyusun Tim Emergency Respose and Crisis Management ditingkat Field dan menentukan tugas dan tanggung jawab *Tim Emergency Respose and Crisis Management* di ditingkat field PT OG field melakukan evaluasi terhadap keadaan darurat baik keadaan daruat yang di sebabkan oleh alam, non alam, dan keadaan daruat sosial.

Program ERCM (*Emergency Response and Crisis Management*) di OG Field berupa: Program ERCM berupa: Emergency Need Assessment (ENA; Pre Incident Planning (PIP; Mengisi buku tamu Menukarkan kartu identitas dengan kartu pass Memeriksa SIML (Surat Izin Masuk Lokasi); Training dan Kompetensi: First Aid dan Basic fire fighting;Inspeksi Peralatan ERCM Fire Protection Equitment (Fixed Fire Pump, APAR/APAB, Fire Hydrant, Fire Monitor, Fire Hose Box dan Firebox Deluge Valve Water Spray System) and Oil Spill Equitment (Oil Boom, Skimmer dan Spill kit); Simulasi keadaan darurat. Implementasi ERCM (Emergency Response and Crisis

Management) di OG Field berupa: a). Melakukan ENA (Emergency Need Assessment) identifikasi konsekuensi dan kebutuhan penanggulangannya yang di evaluasi setiap 1 tahun sekali yang dilakukan pada 15 September 2021; b). Membuat PIP (Pre Incident Planing) dokumen yang berisi prosedur penanggulangan, pengendalian bahaya existing yang tersedia, dan sumber daya penanggulangan yang diperlukan dimana dokumen disusun dalam 3 (tiga) tahap respon, yaitu respon awal, penanggulangan awal dan penanggulangan lanjut. Yang dilakukan pada 15 September 2021. c). Melakukan Pengendalian Akses Berupa Memeriksa kendaraan yang masuk ke area kerja, Memeriksa SIML (Surat Izin Masuk Lokasi) yang dilakukan setiap hari. d). Melakukan Kegiatan kesehatan yang terdiri dari Fit To Work kegiatan ini dilakkan dengan cara Pemeriksaan tekanan darah, e). Pemeriksaan saturasi oksigen dan Pemeriksaan suhu tubuh yang dilakukan setiap hari serta melakukan *Surveillance* SWAB Anti Gen yang dilakukan setiap 2 kali seminggue); f). Melakukan inspeksi peralatan ERCM dilakukan secara rutin dan di evaluasi setiap tahun diantaranya *Fire Protection Equipment; Fixed Fire Pump; APAR/APAB; Fire Hydran; Fire Monitor; Fire Hose Box ; Deluge Valve Water Spray System; Oil Spill Equipment.; Oil Boom; Skimmer; Spill kit*. Pemeriksaan secara rutin dan evaluasi terdapat pada Fire Protection Equipmen sedangkan Oil Spill Equipment belum dilakukan pemeriksaan secara rutin.

OG *Field* melakukan kegiatan pelatihan kepada seluruh pekeja. Pelatihan yang dilakukan diantaranya sebagai berikut: a). First aid dilakukan pada tanggal 23-24 Desember 2020; b). Basic Fire

Fighting dilakukan pada tanggal 09 Februari 2022; c). Simulasi.

OG *Field* melakukan kegiatan simulasi kepada seluruh pekerja. Kegiatan ini dilakukan setiap setahun 1 kali Simulasi Keadaan darurat/ fire drill Simulasi ini telah dilakukan dengan baik di lakukan pada tanggal 13 Oktober 2021.

Penerapan NFPA 1600, tahun 2019 di PTOG meliputi: a). Penerapan NFPA 1600, tahun 2019 di PTOG, sudah sesuai dengan standard yang diacu dan sebagian besar sudah sesuai dengan regulasi, dan dari observasi lapangan terbukti dan data semua ada juga sudah terdokumentasi dengan baik. b). Perlu ada petugas yang bertanggung jawab atas kegiatan komunikasi dan koordinasi dengan pihak external (RS, BNPBD, Damkar dll), hal ini di lakukan oleh pekerja dari Area.

OG *Field* dapat mempertahankan dan meningkatkan prosedur yang sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB NO. 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Pedoman ERCM (Emergency Response Plan). Prosedur yang terdapat di OG field sebaiknya menambahkan hasil revisi yang di temukan berupa masalah di area OG *field*.

REFERENSI

Badan Pelaksana MIGAS. Pedoman Tata Kerja Manajemen Krisis Kegiatan Usaha Hulu Minyak. 2012.

Hardiyanto S, Pulungan D. Komunikasi Efektif Sebagai Upaya Penanggulangan Bencana Alam di Kota Padangsidimpuan. J Ilmu Komun [Internet]. 2019;3(1). Available from: <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/interaksi/article/view/2694>

Mahardika, Dio; Setianingsih EL. Manajemen Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Semarang. *J Public Policy Manag Rev* [Internet]. 2018;7(2):502–18. Available from: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/20242>

NFPA 1600 Standard on Continuity, Emergency, and Crisis Management. United State: National Fire Protection Association; 2019.

Nurdin R. Komunikasi dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal SIMBOLIKA Res Learn Commun Studyand Learn Commun Study* [Internet]. 2015;1(1):51–61. Available from: <https://ojs.uma.ac.id/index.php/simbolika/article/view/49>

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Ramli S. Manajemen Bencana Dan Kelangsungan Bisnis. Jakarta: Yayasan Pengembangan Keselamatan Prosafe Institute; 2020.

Sugiyono. Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Yogyakarta: Alfabeta; 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana